

## **PERANAN BUMDes DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PATTONGKO KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

**Nurliana<sup>1)</sup>, Andi Besse Lia<sup>2)</sup>, Sulfiana<sup>3)</sup>, Mahyudin Usman<sup>4)</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Sulawesi <sup>1,2,3,4)</sup>

Email: nurlianaabna@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BUMDes telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk dapat melihat gejala yang dapat diamati pada kehidupan nyata. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Karampuang memiliki tiga jenis usaha yaitu 1) usaha simpan pinjam, 2) budidaya ternak kambing, 3) kerajinan tangan. Ketiga jenis usaha tersebut berjalan kurang baik dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat secara signifikan. Beberapa saran dari yang dihasilkan antara lain 1) Pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa harus menjaga keseimbangan relasi untuk menghindari dominasi satu pihak, 2) Meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi agar pengelolaan BUMDes lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, 3) Pengelola BUMDes perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi

Kata kunci: BUMDes, Perekonomian Masyarakat, Kesejahteraan

### **ABSTRACT**

*This reserach to determine the exent to which BUMDes have played a role in encouraging economic growth in Pattongko Village, Tellu Limpoe, Sinjai Regency. This research uses descriptive qualitative research methods to see symptoms that can be observed in real life. Based on the research results, it can be concluded that BUMDes Karampuang has three types of business, namely 1) saving and loan business, 2) goat cultivation, 3) handicrafts. These three types of business are not running well and have not been able to significantly improve the economic welfare of the local community. Some suggestions from the results include 1) BUMDes Managers and Village Governments must maintain a balance in relations to avoid domination by one party, 2) Improve the quality of communication and socialization so that BUMDes management is more transparent and increase public trust, 3) BUMDes Managers need to improve the quality of service and also the ability to manage the organization.*

*Keywords: BUMDes, Community Economy, Welfare*

## PENDAHULUAN

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Kinasih, Widiyahseno, & Wahjuni, 2020). Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. desa memiliki wewenang yang mencakup: urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang di dalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Pelaksanaan dari kegiatan di lembaga ini tidak lepas dari peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap profesional dalam memberikan pelayanan bagi warganya. Dari peran ini, banyak warga telah terbantu untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Disisi lain, kegiatan lain yang dilaksanakan BUMDes untuk membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan yakni dengan mengalokasikan dana 15% untuk kegiatan bantuan sosial (Prasetyo, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut adalah upaya pembangunan bidang ekonomi desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Salmiah, Nanda, & Adino, 2021 BUMDes merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Besarnya peranan BUMDes dalam memberikan kontribusi keuangan maupun kesejahteraan sosial, membuat perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, (4) pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan dibantu oleh perangkat desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus selalu memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, BUMDes dapat berperan dalam mengoptimalkan potensi sektor-sektor tertentu yang ada di desa, seperti Unit usaha simpan pinjam, peternakan, dan kerajinan tangan. Dalam prosesnya, BUMDes juga bisa mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan masyarakat lokal.

Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan nilai angka pendapatan asli desa yang kemudian bisa mengurangi nilai angka kemiskinan di Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kecamatan Sinjai. BUMDes ada karena adanya ekonomi yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintahan untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa yang kemudian masuk ke pendapatan desa (Nihayah, Moehadi, & Mustofa, 2021).

Namun, meskipun BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tantangan seperti kurangnya keterampilan manajerial, minimnya akses pada sumber daya, serta masalah dalam pemasaran produk seringkali menghambat efektivitasnya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana BUMDes telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji terkait “Peranan Bumdes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai”. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai, 2) Untuk mengetahui apakah dengan adanya BUMDes bisa mengurangi angka kemiskinan.

## **STUDI LITERATUR**

### **A. Masyarakat Sejahtera**

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasi (Wijayanti & Ihsanuddin, 2013).

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau *welfare of all*. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Diantara aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan adalah pendapatan, populasi, kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya (Sukmasari, 2020).

Menurut (Oktriawan, Adriansyah, & Alisa, 2022) kesejahteraan bisa diukur dengan beberapa hal dalam kehidupan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan, kualitas rumah, dan sebagainya.
- b. Kualitas hidup dari segi mental misalnya lingkungan budaya, fasilitas pendidikan, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

### **B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nasional atau Gross Domestic Product (GDP), atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sejumlah sumber daya dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan nilai PDB riil, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi terdiri dari bentuk ekstensif yaitu dengan penggunaan lebih banyak sumber daya atau intensif yaitu kondisi Dimana penggunaan sejumlah sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal demikian tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Akan tetapi ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, maka hal tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

### **C. Pengertian dan Ciri BUMDes**

Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil dalam hal ini keuntungan atau laba.

Menurut Maryunani (2008:51) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
2. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

### **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Karampuang yang terletak di daerah Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini melihat gejala yang dapat diamati pada kehidupan nyata. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang terdiri dari berbagai artikel, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan BUMDes. Pihak-pihak yang terkait dalam fokus penelitian adalah ketua dan anggota BUMDes dari Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu strategi multi metode pengumpulan data seperti wawancara, media massa, studi documenter dan lain-lain.

---

**HASIL****A. Manfaat BUMDes Bagi Masyarakat**

BUMDes dibentuk karena adanya kegagalan pasar sehingga terbentuklah badan usaha milik desa. Hal ini dikarenakan tujuan dari BUMDes merupakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi sumber daya yang ada. Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai memiliki BUMDes yang diberi nama BUMDes Karampuang. BUMDes ini umumnya digunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya diantaranya pada bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, kekuatan BUMDes Karampuang terletak ada komunikasi yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa setempat. BUMDes memberikan laporannya secara tertib setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes ini memiliki akuntabilitas yang baik. BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Desa, PKK, Karang Taruna, BPD, dan berbagai tokoh masyarakat dalam setiap pengambilan Keputusan. Meskipun menggunakan mekanisme musyawarah, BUMDes merupakan lembaga independent, sehingga dapat membuat keputusan secara mandiri. Antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa memiliki Kerjasama dan simbiosis yang baik, saling mendukung, dan mempromosikan desa.

**B. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes****1. Kemampuan Manajerial**

Kelemahan utama dari BUMDes dan Pemerintah Desa adalah dalam hal administrasi dan keuangan. Pencatatan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi (SAK ETAP – Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-bukan Perusahaan yang listing di bursa efek).

**2. Legal Standing**

Belum ada peraturan desa yang mengakui keberadaan BUMDes. BUMDes pun belum memiliki akta notaris.

**3. Transparansi dan Kepercayaan Warga**

Partisipan penelitian menjelaskan pentingnya transparansi khususnya dalam hal pengelolaan BUMDes. Buruknya pelayanan menyebabkan warga tidak mempercayai kemampuan atau kapabilitas pengelola, sehingga mereka meminta adanya pengelolaan yang lebih transparan. Sosialisasi mengenai dana BUMDes tidak dilaksanakan. Warga baru mengetahui adanya dana BUMDes ketika rapat penyusunan APBDes diadakan. Buruknya transparansi ini menyebabkan penurunan kepercayaan warga terhadap kemampuan pengelola BUMDes.

**4. Relasi BUMDes dan Pemerintah Desa**

Pengambilan keputusan di BUMDes Karampuang dilakukan dengan menggunakan mekanisme musyawarah. Akan tetapi pihak Pemerintah Desa mengambil peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pengurus BUMDes. Salah seorang pengelola mengakui bahwa mereka hanya mengikuti “apa kata desa saja” dalam pengambilan keputusan.

**5. Sumber Daya Manusia**

Pengelola BUMDes yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas SDM dari BUMDes. Seperti dalam bentuk pendampingan atau pelatihan untuk meningkatkan *skill* SDM dan kemampuan dalam berwirausaha.

**6. Komunikasi**

Warga yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mengakui bahwa tidak banyak mengetahui secara detail terkait program BUMDes. Warga tidak mengetahui tentang pengelolaan aset, hasil dan kegiatan BUMDes.

**PEMBAHASAN****1. Peran BUMDes Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pattongko**

BUMDes merupakan lembaga yang memiliki peran yang dapat meningkatkan potensi ekonomi yang bertujuan sebagai pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Setelah UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 diterbitkan, maka pada tahun 2015 BUMDes Karampuang dibentuk dan memiliki beberapa usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam, peternakan dan kerajinan tangan. Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana prospek dari jenis usaha yang dilakukan terutama pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

**a. Usaha Simpan Pinjam**

Jenis usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2015 dan memiliki total anggaran sebesar Rp 30.000.000.00 yang didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam pengelolaan UMKM. Dimana perorang diberikan pinjaman minimal Rp 2.000.000.00 / orang. Dari pinjaman tersebut BUMDes mendapat keuntungan senilai 5% dengan waktu tempo 6 bulan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, partisipan mengatakan bahwa unit usaha simpan pinjam tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan pihak peminjam dilakukan oleh orang yang sama. Selain itu, kerap kali pihak peminjam belum melunasi angsuran kemudian mengajukan kembali. Selain itu dana yang diberikan kerap kali dialokasikan untuk hal-hal lain seperti kebutuhan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha simpan pinjam berjalan dengan kurang maksimal dikarenakan perilaku nasabah kurang baik sehingga berdampak pada arus peredaran uang yang dikelola oleh BUMDes.

**b. Budidaya Ternak Kambing**

Usaha ini berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 15 ekor kambing. Sejumlah ekor kambing diberikan kepada 3 kelompok ternak dengan sistem pendapatan 75% untuk peternak dan 25% untuk BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, partisipan menyimpulkan bahwa jika dilihat dari perkembangan usaha ini tergolong lambat. Sampai sejauh ini seluruh yang berada di 3 kelompok masih dalam tahap pembesaran dan ada beberapa yang sedang mengandung. Salah satu penyebab keterlambatan perkembangan ini disebabkan karena penyakit cacangan yang dialami oleh beberapa jumlah kambing.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ternak kambing tersebut berjalan dengan baik namun dari sisi perkembangan cukup lambat. Disisi lain pendapatan dari ternak kambing belum dapat dilihat sehingga hal tersebut menjadi PR bagi pengelola BUMDes bagaimana agar pengembangan ternak kambing dapat cepat berkembang biak dan memberikan pendapatan baik bagi peternak maupun bagi pengelola.

**c. Kerajinan Tangan**

Usaha ini didirikan setelah budidaya ternak kambing dibentuk dan dijalankan. Kegiatan ini melibatkan kelompok ibu PKK di daerah setempat. Selain agar Ibu Rumah Tangga dapat produktif, usaha ini dibentuk dengan tujuan agar warga setempat dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui bahan yang merupakan komoditas desa setempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada partisipan, beliau menyimpulkan bahwa salah satu penghambat dari usaha ini adalah pemasarannya.

Para pengelola masih menggunakan metode konvensional dalam pemasarannya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari para pengelola bisa

mengelola media sosial seperti Facebook dan/atau Instagram untuk penggunaan pribadi.

## 2. Faktor Pendukung Pengelolaan BUMDes

### a. Dukungan Pemerintah

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan BUMDes, baik melalui kebijakan, dana, atau pelatihan. Program-program bantuan dana desa yang diarahkan untuk pembangunan BUMDes, serta kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi desa, sangat membantu kelancaran pengelolaan.

### b. Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal

BUMDes beroperasi di desa memiliki keuntungan karena dapat memanfaatkan sumber daya alam dan budaya local yang khas. Misalnya, produk kerajinan tangan berbasis bahan baku local atau tradisi desa yang dapat dijadikan produk unggulan.

### c. Ketersediaan Modal

Akses terhadap modal yang cukup untuk memulai dan mengembangkan usaha merupakan pendorong utama dalam keberhasilan BUMDes. Modal awal bisa didapatkan dari dana desa, pinjaman, ataupun kerjasama dengan lembaga keuangan mikro.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes Karampuang di Desa Pattongko Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai yang berdiri sejak tahun 2015 memiliki tiga jenis usaha antara lain, jenis usaha simpan pinjam, budidaya ternak kambing, dan kerajinan tangan. Ketiga jenis usaha tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pattongko. Namun hasil penelitian dijelaskan bahwa ketiga jenis usaha BUMDes berjalan kurang baik dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya minimnya kemampuan manajerial, *legal standing* yang belum ada, transparansi yang belum optimal dan menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat, relasi bumdes dan pemerintah, sumber daya manusia kurang memadai dan komunikasi yang tidak efektif

## REFERENSI

- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintah Desa*, 34.
- Nihayah, F. L., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 37.
- Oktriawan, W., Adriansyah, & Alisa, S. (2022). Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Muttaqien*, 5-6.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV Derwati Press.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV Derwati Press.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV Derwati Press.

- 
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes : Survey pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*.
- Wijayanti, L., & Ihsanuddin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomi*.